

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Dinamika harga di Kabupaten Ciamis selama Triwulan II tahun 2025 menunjukkan pola yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor musiman, pasokan, dan permintaan pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta menjelang Idul Adha dan fenomena libur sekolah. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Ciamis memberikan gambaran fluktuasi harga di tingkat lokal. Pada April 2025, IPH tercatat sebesar 0.58% pada Minggu 2, mengindikasikan adanya kenaikan harga setelah periode Maret. Memasuki Mei 2025, IPH menunjukkan deflasi, yaitu -2.14% pada Minggu 1 dan semakin dalam menjadi -2.78% pada Minggu 3. Namun, tren ini berbalik pada Juni 2025, di mana IPH tercatat sebesar 0.76% pada Minggu 3, menandakan adanya kenaikan harga kembali setelah periode deflasi di bulan Mei, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh persiapan Idul Adha dan lonjakan permintaan selama libur sekolah.

Dalam konteks regional, inflasi Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang bervariasi. Pada April 2025, inflasi tahunan Jawa Barat tercatat sebesar 1.67%, mulai meningkat dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $2.5\% \pm 1\%$. Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, menjadi pemicu utama inflasi di bulan ini. Namun, pada Mei 2025, Provinsi Jawa Barat mengalami deflasi bulanan sebesar 0.32% dan inflasi tahunan sebesar 1.47%. Deflasi ini terutama dipicu oleh penurunan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Transportasi. Secara keseluruhan, Jawa Barat berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Pulau Jawa, menempati urutan ke-3 terendah pada April dan ke-2 terendah pada Mei. Komoditas seperti emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan cabai rawit masih menjadi penyumbang inflasi utama secara year-on-year.

Analisis perkembangan harga komoditas pangan utama selama periode April-Juni 2025 menunjukkan pola yang beragam. Harga beras medium cenderung stabil atau sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, memberikan kabar baik bagi daya beli masyarakat. Bawang merah dan cabai merah mengalami penurunan harga yang signifikan di Mei 2025, menjadikannya faktor penekan inflasi. Sebaliknya, cabai rawit merah menunjukkan kenaikan harga yang cukup tinggi, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya. Daging ayam ras dan telur ayam ras cenderung menurun harganya, sementara daging sapi dan gula pasir menunjukkan stabilitas atau sedikit kenaikan. Harga Minyakita juga terpantau stabil, meskipun masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Melihat ke depan, beberapa risiko inflasi perlu diantisipasi secara serius. Menjelang HBKN Idul Adha, kenaikan permintaan hewan qurban berpotensi memicu lonjakan harga daging sapi, kambing, dan domba. Komoditas cabai rawit dan rokok kretek filter diprediksi menjadi andil inflasi utama selama periode ini, sementara telur ayam ras dan daging ayam ras dapat menjadi andil deflasi. Fenomena libur sekolah juga membawa tantangan berupa peningkatan permintaan barang pokok, lonjakan tarif transportasi dan akomodasi, serta potensi spekulasi pasar dan panic buying. Dalam konteks ini, cabai rawit kembali menjadi komoditas yang perlu diwaspadai sebagai pemicu inflasi, sedangkan bawang merah dapat menjadi penekan deflasi.

Selain faktor permintaan musiman, fluktuasi harga pangan global dan ketergantungan pada impor untuk komoditas strategis juga dapat memicu tekanan inflasi. Perubahan iklim, seperti prakiraan awal musim kemarau di Mei 2025 dan perubahan musim (pancaroba), berpotensi

mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura seperti cabai, bawang, dan padi. Gangguan distribusi akibat keterlambatan pengiriman karena demo sopir terkait pelarangan truk ODOL dapat mengancam pasokan telur dan cabai. Infrastruktur jalan yang terbatas dan kemacetan saat libur panjang juga dapat menghambat distribusi. Terakhir, praktik spekulasi pasar dan penimbunan menjelang Idul Adha merupakan ancaman serius yang menuntut kewaspadaan dan intervensi proaktif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis, sebagaimana di banyak daerah lain di Jawa Barat, dihadapkan pada serangkaian permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Salah satu isu fundamental adalah keterbatasan data dan integrasi sistem. Meskipun Kabupaten Ciamis telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pelaporan data harian secara rutin dan lengkap, permasalahan serupa masih kerap ditemukan di beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya, yang mengalami absensi atau ketidaklengkapan data input harga pada bulan Mei dan Juni. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya, integrasi data yang sempurna antar daerah atau antar sistem masih belum tercapai. Akibatnya, pemantauan harga yang akurat dan real-time menjadi terhambat, yang pada gilirannya menyulitkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam merumuskan dan mengambil keputusan intervensi yang tepat dan cepat.

Permasalahan kedua yang signifikan adalah fluktuasi produksi dan pasokan pangan, yang sangat bergantung pada kondisi musim dan iklim. Sektor pertanian, sebagai tulang punggung pasokan pangan, rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Perubahan musim, seperti pancaroba, dan potensi awal musim kemarau dapat secara langsung mengganggu produksi komoditas hortikultura dan padi. Meskipun neraca pangan Jawa Barat menunjukkan adanya surplus untuk 12 komoditas per Mei 2025, prognosa defisit untuk beberapa komoditas pangan strategis lainnya tetap menjadi perhatian serius. Ketidakpastian dalam produksi ini secara langsung memengaruhi ketersediaan pasokan di pasar, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga dan tekanan inflasi.

Selanjutnya, distribusi dan logistik yang belum optimal menjadi kendala krusial dalam menjaga stabilitas harga. Akses infrastruktur jalan yang masih terbatas, terutama di daerah perbatasan, seringkali menjadi hambatan utama dalam kelancaran distribusi komoditas pangan dan hewan qurban. Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat saat libur panjang dapat menyebabkan kemacetan parah, yang secara tidak langsung berdampak pada efisiensi dan kecepatan distribusi pangan dari sentra produksi ke pasar konsumen. Isu-isu seperti pelarangan truk Over Dimension Over Load (ODOL) juga berpotensi memperparah masalah ini, mengancam pasokan komoditas vital seperti telur dan cabai ke wilayah-wilayah konsumen, termasuk Jakarta dan Jawa Barat.

Di samping tantangan struktural, perilaku pasar dan spekulasi juga turut memperkeruh kondisi inflasi. Kenaikan harga yang tidak wajar seringkali bukan semata-mata disebabkan oleh faktor pasokan dan permintaan murni, melainkan dipicu oleh praktik spekulasi dan penimbunan oleh oknum-oknum tertentu. Fenomena ini cenderung meningkat menjelang HBKN dan libur panjang, di mana permintaan konsumen melonjak. Lebih lanjut, ekspektasi

konsumen yang tinggi terhadap kenaikan harga dapat memicu perilaku panic buying atau pembelian berlebihan, yang justru memperburuk situasi dengan menciptakan permintaan artifisial dan mendorong harga semakin tinggi.

Terakhir, dampak inflasi secara langsung mengikis daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ketika harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka menjadi berkurang. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial, serta berpotensi menimbulkan gejolak sosial jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, permasalahan inflasi bukan hanya sekadar isu ekonomi makro, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang mendalam, menuntut pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dari TPID Kabupaten Ciamis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi selama Triwulan II 2025:

1. Pemantauan Ketersediaan Stok dan Harga:
 - Terus melakukan pemantauan ketersediaan stok bahan pokok penting (bapokting) melalui data di aplikasi maupun sidak ke pasar dan distributor besar.
 - Pengawasan harga komoditas pangan strategis sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP) di pasar tradisional maupun ritel modern, bekerjasama dengan Satgas Pangan setempat.
2. Intervensi Pasar:
 - Mengintensifkan kegiatan pasar murah untuk memastikan masyarakat memperoleh harga pangan yang terjangkau serta membantu percepatan penyerapan komoditas pangan pada produsen, terutama daging ayam ras dan telur ayam ras yang harganya sedang turun.
 - Dinas Perdagangan Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi terkait program dukungan distribusi Minyakita oleh BUMN Pangan.
3. Peningkatan Produksi dan Pasokan:
 - Pemda Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BULOG setempat dalam penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani.
 - Melakukan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga.
 - Peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan impor sesuai Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
4. Pengelolaan Cadangan Pangan:
 - Pemenuhan Standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023.
 - Kerjasama Antar Daerah (KAD):
 - Melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bagi daerah defisit dengan daerah yang surplus.
5. Koordinasi dan Edukasi:
 - Mengintensifkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hemat energi dan konsumsi bijak.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Capaian Positif:

- Inflasi Terkendali di Tingkat Provinsi: Inflasi tahunan Jawa Barat pada April (1.67%) dan Mei (1.47%) 2025 menunjukkan keberhasilan menjaga inflasi dalam rentang target nasional, bahkan menjadi salah satu yang terendah di Pulau Jawa.
- Penurunan Harga Komoditas Tertentu: Penurunan harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras pasca-Lebaran menunjukkan efektivitas intervensi atau kondisi pasokan yang membaik.
- Stok Pangan Aman: Neraca pangan Jawa Barat menunjukkan 12 komoditas pangan mengalami surplus, dan stok cadangan pangan per 20 Juni 2025 terpantau aman, mengindikasikan ketersediaan pasokan yang memadai secara umum.
- Sistem Pemantauan Harga: Kabupaten Ciamis secara konsisten melakukan input data harian yang rutin dan lengkap ke SILINDA JABAR, menunjukkan komitmen terhadap pemantauan harga yang baik.

2. Area Perbaikan:

- Akurasi dan Kelengkapan Data: Meskipun Ciamis baik, masalah absensi dan ketidaklengkapan data input harga di beberapa kabupaten/kota lain (misalnya Kab. Bekasi, Kab. Ciamis, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya pada bulan Mei dan Juni) masih menjadi tantangan, yang dapat mengurangi akurasi analisis dan kecepatan respons di tingkat provinsi.
- Efektivitas Intervensi Pasar: Meskipun pasar murah dilaksanakan, dampaknya terhadap stabilisasi harga di tingkat konsumen perlu dievaluasi lebih mendalam, terutama untuk komoditas yang terus mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit dan gula pasir yang masih di atas HET/HAP.
- Antisipasi Dampak Iklim dan Gangguan Produksi: Meskipun ada koordinasi dengan BMKG, langkah mitigasi konkret terhadap potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim dan hama (wereng, tikus) perlu lebih diintensifkan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Efektivitas Satgas Pangan dalam mencegah spekulasi dan penimbunan, terutama menjelang Idul Adha dan libur sekolah, perlu terus ditingkatkan dengan penegakan hukum yang tegas.
- Manajemen Distribusi: Isu-isu seperti pelarangan truk ODOL dan kendala infrastruktur jalan menunjukkan perlunya strategi manajemen distribusi yang lebih adaptif dan tanggap.

3. Rekomendasi Kebijakan:

1. Pemantauan Ketersediaan Stok dan Harga:

- Terus melakukan pemantauan ketersediaan stok bahan pokok penting (bapokting) melalui data di aplikasi maupun sidak ke pasar dan distributor besar.
- Pengawasan harga komoditas pangan strategis sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP) di pasar tradisional maupun ritel modern, bekerjasama dengan Satgas Pangan setempat.

1. Intervensi Pasar:

- Mengintensifkan kegiatan pasar murah untuk memastikan masyarakat memperoleh harga pangan yang terjangkau serta membantu percepatan penyerapan komoditas pangan pada produsen, terutama daging ayam ras dan telur ayam ras yang harganya sedang turun.
- Dinas Perdagangan Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi terkait program dukungan distribusi Minyakita oleh BUMN Pangan.

1. Peningkatan Produksi dan Pasokan:

- Pemda Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BULOG setempat dalam penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani.
- Melakukan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga.
- Peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan impor sesuai Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

1. Pengelolaan Cadangan Pangan:

- Pemenuhan Standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023.

1. Kerjasama Antar Daerah (KAD):

- Melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bagi daerah defisit dengan daerah yang surplus.

1. Koordinasi dan Edukasi:

- Mengintensifkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hemat energi dan konsumsi bijak.

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, dengan mengacu pada arahan Kementerian terkait dan praktik terbaik:

1. Peningkatan Akurasi dan Integrasi Data:

- Optimalisasi SILINDA JABAR: TPID Kabupaten Ciamis harus terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas input data harga pangan pokok strategis ke aplikasi SILINDA JABAR secara rutin, harian, dan lengkap, termasuk pada hari libur. Mendorong kabupaten/kota lain untuk mencapai standar yang sama.
- Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas penginput data di pasar untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data.

2. Penguatan Ketersediaan Pasokan dan Peningkatan Produksi:

- Program Peningkatan Produksi Lokal: Mengintensifkan program peningkatan produksi komoditas pangan strategis yang rentan terhadap fluktuasi harga, seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi/ayam, melalui:
- Penyaluran subsidi benih unggul dan alat mesin pertanian (alsintan) yang tepat sasaran.
- Pengawasan distribusi pupuk secara intensif.
- Mendorong Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen di lahan pekarangan dan lahan petani.
- Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang Proaktif: TPID Ciamis harus secara proaktif menjalin KAD dengan daerah surplus pangan untuk memastikan pasokan yang

stabil, terutama menjelang HBKN Idul Adha dan libur sekolah. Perjanjian KAD harus mencakup volume, harga, dan jadwal pengiriman yang jelas.

- Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD): Memastikan pemenuhan standar CPPD sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, dan menggunakannya sebagai instrumen stabilisasi harga saat terjadi gejolak.

3. Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Pengawasan Pasar:

- Optimalisasi Operasi Pasar dan GPM: Melaksanakan operasi pasar dan GPM secara lebih terarah dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis, komoditas prioritas (terutama cabai rawit dan daging), dan evaluasi dampak yang jelas.
- Pengawasan Harga dan Stok: Mengintensifkan pengawasan harga komoditas pangan strategis agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP) di pasar tradisional maupun ritel modern.
- Penegakan Hukum: Bersama Satgas Pangan, melakukan tindakan tegas terhadap praktik spekulasi dan penimbunan yang merugikan masyarakat.
- Manajemen Logistik: Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan distribusi, termasuk koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang dan antisipasi dampak kebijakan seperti pelarangan truk ODOL.

4. Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dini:

- Koordinasi dengan BMKG: Mengintensifkan koordinasi dengan BMKG setempat untuk mendapatkan informasi cuaca dan iklim yang akurat, serta menyusun langkah strategi antisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan ketersediaan pasokan.
- Edukasi dan Komunikasi Publik: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi yang bijak dan tidak panik membeli (panic buying) menjelang HBKN dan libur sekolah.
- Pengelolaan Administered Price: Pemerintah daerah diharapkan untuk tidak menaikkan harga kelompok Administered Price (seperti harga LPG, tarif air, dll.) pada periode HBKN untuk menjaga stabilitas harga.

5. Penguatan Kelembagaan dan Anggaran:

- Alokasi Anggaran BTT: Memastikan ketersediaan dan fleksibilitas alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD Kabupaten Ciamis untuk intervensi pengendalian inflasi yang mendesak.

Peningkatan Kapasitas TPID: Melanjutkan program capacity building bagi anggota TPID, termasuk studi banding ke daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.
Melibatkan BUMD dan BUMDes: Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di tingkat lokal

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.